



**IMPLEMENTASI PROGRAM TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA
BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

FIMA FEBRIANI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

abstrak

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah. Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan telah membentuk lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) di setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa Beringin Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi tepat guna di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah sudah berjalan dengan baik terutama dua program yang sedang berjalan saat ini yaitu program menjahit dan peminjaman alat membajak secara gratis kepada masyarakat sementara masih ada dua program yang belum terlaksana yaitu program GIGADES (sistem pelayanan administrasi secara digital) dan program membuat batik.

Kata Kunci : Teknologi Tepat Guna, Implementasi

ABSTRACT

Appropriate Technology which is further called TTG is a technology that is in accordance with the needs of the community, can answer community problems, does not damage the environment, can be utilized and maintained by the community easily. The application of Appropriate Technology in the Management of Village Natural Resources in the implementation of the Appropriate Technology (TTG) program and has established appropriate technology service institutions (TTG) in every sub-district and village / village spread in the Kuantan Singingi Regency area. The formulation of the problem in the research is how to apply Appropriate Technology (TTG) in Beringin Taluk Kuantan Village of Kuantan Tengah District of Kuantan Singingi Regency.

The type of research used in this research is a type of qualitative research. The data collection techniques that the authors use are observation techniques, documentation techniques and interview techniques. Data obtained through interviews is processed with qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the application of appropriate technology in Beringin Taluk Village of Kuantan Tengah district has been running well, especially two programs that are currently running, namely sewing and borrowing ploughing tools for free to the community while there are still two programs that have not been implemented, namely the GIGADES program (digital administrative service system) and the batik's program.

Keywords: Appropriate Technology, Implementation



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia (KBBI). Penggunaan teknologi diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Pemanfaatan teknologi sangat penting dalam memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Namun dalam perkembangannya, teknologi pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan, yang terkadang memberikan dampak yang buruk bagi manusia dan lingkungan.

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sederhana yang berbasis pada penggunaannya, artinya fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya sehingga lebih tepat guna.

Dengan adanya Teknologi Tepat Guna maka segala pekerjaan manusia akan di mudahkan dan dapat mengatur efisiensi waktu yang di butuhkan. Pada umumnya teknologi tepat guna haruslah berlandaskan pada kebergunaannya dalam lingkungan masyarakat. Hal yang sangat mendasar yang harus di miliki oleh energi tepat guna adalah adanya metode hemat sumber daya. Dengan begitu maka masyarakat tidak perlu bekerja keras lagi dalam menyelesaikan segala macam pekerjaannya.

Pelaksanaan program pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan sasaran yang ada dengan mengacu Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam pelaksanaan Teknologi Desa Beringin Taluk masih terdapat permasalahan dalam Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut, antara lain hanya ada dua program yang sedang berjalan saat ini yaitu program menjahit dan membajak sedangkan ada dua program yang belum terlaksana yaitu program GIGADES (Sistem Pelayanan Administrasi Secara Digital) dan program membuat batik. Program GIGADES saat ini belum terlaksana karena aplikasi berbayar sementara anggaran sudah tersedia tetapi belum terbayarkan karna masih mencari jadwal untuk mengeluarkan aplikasi tersebut sedang program batik belum terlaksana karena icon Desa Beringin belum tergambarkan dengan jelas. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Beringin Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”?

Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Beringin Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dengan mengetahui efektivitas pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi,teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya,karena TTG jika dimanfaatkan secara tepat dan optimal dapat meningkatkan efisiensi,kapasitas produksi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan tekad, komitmen, keterampilan, dan kemampuan untuk membangun struktur ekonomi desa yang mantap dan kokoh.

LANDASAN TEORI

Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Herman Finer (dalam Syaifiie, 2016 : 11), Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi.

Menurut Robert MacLiver (dalam Syaifiie, 2016 : 11), Negara adalah gabungan antara suatu system kelembagaan dalam organisasinya sendiri sehingga bila membahas tentang Negara, kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi penyelenggara.

Menurut Kranenburg (dalam Syaifiie, 2016 : 9), Negara adalah suatu system dari tugas-tugas umum dan organisasi yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputinya, sehingga harus ada pemerintah yang berdaulat.

Menurut Sondang P. Siagian (2015 : 1), Administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syaifiie, 2016 : 32), Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syaifiie, 2016 : 32), Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Teori/Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu system perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Hasibuan, 2016 : 5).

Organisasi berasal dari kata Organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Menurut Stephen P. Robbins (dalam Fahmi, 2017 : 153), mendefinisikan organisasi adalah kesatuan (entity) social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.



Menurut Oliver Sheldon (dalam Sutarto, 1998 : 22), organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Menurut Hasibuan (2016 : 5), organisasi adalah suatu system perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater dalam Leo Agustino (2006 : 139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012:105) pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu: policy output dan policy outcome.

1. Policy output

Kinerja *policy output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Ripley dalam Purwanto (2015:106) , indikator kinerja output antara lain:

a. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan.

b. Cakupan (Coverage)

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

c. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau



program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut, indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali.

d. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

e. *Service delivery* (Ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

f. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

2. *Policy Outcome*

Kedua adalah policy outcome, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, policy outcome juga disebut sebagai dampak kebijakan (policy impact). Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki. Hasil kebijakan ini jika dirunut merupakan konsekuensi lanjutan atas keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran.

Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Edwin B. Flippo Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. Menurut Dare Yoder (dalam Hasibuan, 2016 : 10), manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka.



Menurut Nawawi (2005 : 42), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan praktis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan).

Menurut Kasmir (2016 : 6), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder.

Menurut Fahmi (2016 : 1) Manajemen Sumber Daya Manusia (*human resources management*) adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif).

Teori/Konsep E-government

Dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbentuk sebuah sistem manajemen dan aktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. *e-government* atau *electronic government* merupakan suatu upaya untuk menyebarkan bentuk pemerintahan yang berbasis elektronik. Menurut Indrajit dalam buku *E-government In action* (2005:5) menyatakan *E-government* adalah suatu usaha menciptakan suasana pelayanan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakeholder yang ada misalnya :

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya.
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Teori/Konsep Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen mengandung arti sekumpulan orang, seperangkat pedoman dan pemilihan peralatan pengolahan data, menyimpan, mengolah dan memakai data untuk mengurangi ketidak pastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi kepada manajer agar dapat dimanfaatkan pada waktunya secara efisien (Harbangan Siagian, 1989: 22).

Didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna baik pada saat itu maupun di masa mendatang, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia guna mencapai tujuan (Yeniretnowati, "Sistem Informasi Manajemen" dalam [http:// yeniretnowati. blogspot. com/](http://yeniretnowati.blogspot.com/), diunduh pada tanggal 20- 12-2013).

Teori/Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

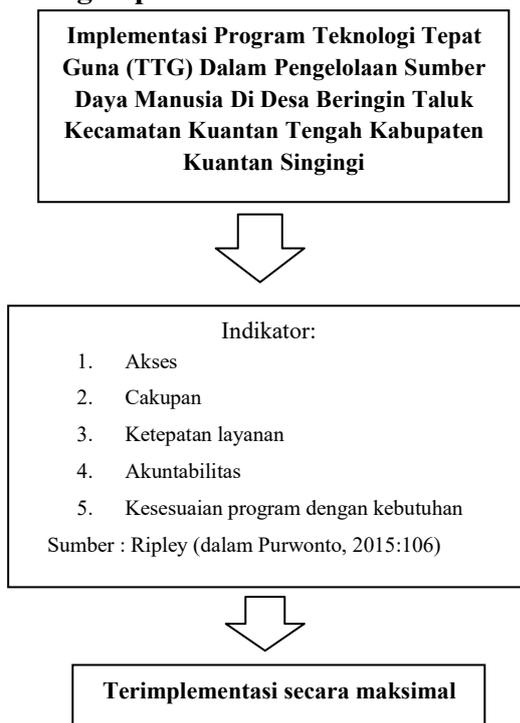


setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi dan Martini, 1996). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau



keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Mukhtar, 2013).

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif langsung di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan gambaran gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih *key informan* dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan. Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Key Informan* adalah *subjac* ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini.

Tabel III.1 : Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Umum	1
4	Kasi Pemerintahan	1
5	BPD	1
6	Masyarakat	5
Jumlah Informan		10

Sumber : Data Olahan 2021

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017 : 162). Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3orang perangkat desa dan 44 orang masyarakat

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2015:145)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang ditelit dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan lainnya (Irawan Soehartono, 2015 : 70-71).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Informan Penelitian

Jumlah informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari kepala Desa, Sekrestaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, BPD dan Masyarakat.

a. Informan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan yang penulis gunakan terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Karakteristik Informan dilihat dari Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100 %

Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan untuk penelitian implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional berbasis modern kabupaten kuantan singingi lebih banyak didominasi oleh laki – laki yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 70% sedangkan perempuan 3 orang dengan persentase 30%.

b. Informan Menurut Kelompok Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa saja yang tidak dan harus dilakukan. Disamping itu tidak dipungkiri juga bahwa usia juga mempengaruhi fisik seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tua usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelebihan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan usianya yang lebih muda.

Berikut ini akan dikelompokkan jumlah responden berdasarkan umur yang telah peneliti kelompokkan dalam 4 kategori yaitu umur 20-30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 Tahun, dan 51-60 Tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Karakteristik Informan Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	2	20%
2	31-40	2	20%
3	41-50	5	50%

4	51-60	1	10%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berkisar antara umur 20-30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 20%, umur 31-40 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 20%, umur 41-50 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 50%, dan umur 51-60 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

c. Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan serta merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan akan membuat matang pola pikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku serta dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengenai tingkat pendidikan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 Karakteristik Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	-
2	SMP Sederajat	0	-
3	SMA Sederajat	6	60%
4	Diploma	1	10%
5	Sarjana	3	30%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tamat SD dan SMP berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tamat SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 60% ,tamam Diploma berjumlah 1 dengan persentase 10% dan sarjana berjumlah 3 orang dengan persentase 30%.

d. Informan Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai status pekerjaan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Karakteristik Informan Menurut Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	10%
2	Sekretaris desa	1	10%
3	Kasi pemerintahan	1	10%
4	Kaur Umum	1	10%
5	BPD	1	10%
6	Masyarakat	5	50%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa status pekerjaan informan yang penulis gunakan terdiri dari Kepala Desa berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, Kasi Pemerintahan berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, Kaur Umum berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, BPD berjumlah 1

orang dengan persentase 10% dan Masyarakat Desa Beringin Taluk berjumlah 5 orang dengan persentase 50%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari jawaban hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti mendapat jawaban dari setiap item penilaian dari setiap item penilaian dari setiap indikator yang ada, dan peneliti dapat menyimpulkan Implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik walau masih ada 2 program yang belum terlaksana, dapat dilihat berikut ini.

1. Untuk jawaban indikator pertama yaitu akses, digunakan untuk mengetahui bahwa program atau layanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Dari hasil wawancara didapat hasil bahwa masyarakat sangat mudah mendapatkan pelatihan program penerapan teknologi tepat guna yang sedang berjalan saat ini karena perangkat desa dan masyarakat turun langsung kelapangan dan adanya ketersediaan anggaran yang memungkinkan untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Masyarakat mendapatkan pelatihan program penerapan teknologi tepat guna cukup mudah, karena periode pertama alat mesin jahit dari pemerintah sedangkan kelompok periode kedua alat mesin jahit dari perangkat Desa Beringin Taluk dan dibidang pertanian yaitu membajak meraka tidak melakukan pelatihan karna mereka turun langsung kelapangan.
2. Untuk jawaban indikator kedua yaitu cakupan, digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Program penerapan teknologi tepat guna telah mencakup seluruh masyarakat di desa beringin taluk bahkan yang tidak terdata sekalipun karna pelatihan yang dilakukan untuk semua kalangan masyarakat yang berusaha dan berminat mengikuti program penerapan teknologi tepat guna yang sudah tersedia di Desa Beringin Taluk dan disesuaikan dengan anggaran. Program penerapan teknologi tepat guna di informasi kan melalui RT dan berbagai pengumuman.
3. Untuk jawaban indikator ketiga yaitu ketepatan layanan, untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat, program penerapan teknologi tepat guna sudah sangat tepat kepada masyarakat yang ada di Beringin Taluk bahkan masyarakat yang belum terdata. Manfaat yang didapatkan dalam adanya program penerapan teknologi tepat guna ini sangatlah banyak masyarakat mendapatkan kemudahan dan keterampilan untuk mendapatkan pelayanan dan adanya program ini meningkatkan ekonomi masyarakat seperti halnya dua program yang sedang berjalan program menjahit masyarakat yang mengikuti program tersebut.
4. Untuk jawaban indikator keempat yaitu akuntabilitas, menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam program penerapan teknologi tepat guna masyarakat bisa melihat langsung ke kantor desa karna pihak desa menempelkan baliho di depan kantor desa beringin taluk jadi masyarakat dengan mudah mengetahui anggaran yang digunakan dalam program penerapan teknologi tepat guna tanpa ada yang ditutupi. Sehingga bisa disimpulkan program penerapan teknologi tepat guna sudah terlaksana akuntabilitas dan

transparan sehingga masyarakat mengetahuinya semua anggaran yang telah digunakan.

5. Untuk jawaban indikator kelima yaitu kesesuaian program dan kebutuhan, mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Dari kesesuaian program dan kebutuhan dapat diketahui program penerapan teknologi tepat guna sudah tepat dalam pelaksanaannya di Desa Beringin Taluk, masyarakat sangat antusias dengan adanya program teknologi tepat guna dan dengan adanya program tersebut sangat membantu ekonomi masyarakat di Desa Beringin Taluk dimana selain masyarakat mendapat pelatihan secara gratis juga masyarakat bisa menggunakan alat bajak secara gratis.

Kesimpulan dari Implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan melalui lima indikator diatas didapatkan hasilnya bahwa penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yaitu program menjahit dan membajak telah terlaksana dengan baik. Masyarakat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah telah merasakan manfaat dan kemudahan dari kedua program tersebut meskipun dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa Beringin Taluk masih ada 2 program lagi yang belum berjalan yaitu program program GIGADES (sistem pelayanan administrasi secara digital) dan program membatik.

Kesimpulan

Implementasi Program Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya manusia di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Beringin Taluk Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa program penerapan teknologi tepat guna sudah berjalan dengan baik terutama dua program yang sedang berjalan saat ini yaitu program menjahit dan membajak sedangkan ada dua program yang belum terlaksana yaitu program GIGADES (sistem pelayanan administrasi secara digital) dan program membatik. Program menjahit yang sedang berjalan saat ini masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan pelatihan, pelatihan dilakukan di balai desa sedangkan untuk program membajak tidak ada pelatihan melainkan masyarakat turun langsung kelapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan indikator-indikator keberhasilan :

1. Dalam strategi penerapan disarankan lebih mengutamakan program yang akan di buat dengan melihat visi misi yang telah di cetuskan sehingga apa yang menjadi tujuan desa dari dapat di capai dikemudian hari.
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Finansial pada Desa Beringin Taluk Kuantan, atau dapat menggunakan sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna di Desa Beringin Taluk Teluk Kuantan sehingga tidak ada lagi program yang tertunda pelaksanaannya.
3. Program yang telah dilaksanakan hendaknya dipertahankan sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Desa Beringin Taluk Teluk Kuantan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Davis, Gordon B. 1995. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : CV. Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Elektronik Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset
- Indrajit, dkk. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press,
- Novitasari, Erna. 2011. *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Quadrant
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta : Cahaya Prima Sentosa
- Siagian, Harbangan. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Semarang; Satya Wacana
- Stoner, James A.F. 1992. *Manajemen*. Jilid 2. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sutarto, 1998. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. Bandung : Rafika Aditama
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja. Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wursanto, IG. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

C. Dokumentasi

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa